



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xix
1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian	8
Manfaat Penelitian	8
Ruang Lingkup Penelitian	8
2 TINJAUAN PUSTAKA	10
Kebijakan Publik	10
Perencanaan dan Anggaran Pemerintah	20
Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	27
Kebijakan dan Peran Sektor Pertanian	30
Regresi Linier	32
Penelitian Terdahulu	33
Kerangka Pemikiran	37
Hipotesis Penelitian	40
3 METODE	41
Lokasi dan Waktu Penelitian	41
Jenis dan Sumber Data	41
Definisi Operasional	42
Metode Analisis Data	43
4 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	52
Sejarah Singkat	52
Visi, Misi, Tujuan dan Target Utama Kementerian Pertanian	53
Struktur Organisasi	56
5 HASIL DAN PEMBAHASAN	58
Hasil Analisis Deskriptif	58
Analisis Kualitatif	76
Analisis Ekonometrika	103
Implikasi Manajerial	121
6 KESIMPULAN DAN SARAN	127
Kesimpulan	127
Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	134

© Hak cipta milik IPB, tahun 2013

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



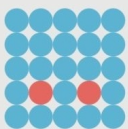
DAFTAR TABEL

1.	Perkembangan alokasi belanja dan realisasi penggunaan anggaran Kementerian Pertanian per triwulan periode tahun 2005-2012	4
2.	Tingkat produksi beberapa komoditas pertanian Indonesia tahun 2005-2012 (dalam ribu ton)	4
3.	Kajian penelitian terdahulu	35
4.	Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian	42
5.	Penjelasan <i>degree of fit</i>	46
6.	Jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2005-2012	60
7.	Neraca perdagangan sektor pertanian Indonesia tahun 2005-2012 (dalam ribu USD)	62
8.	Perkembangan nilai realisasi investasi PMDN di Indonesia menurut sektor (miliar rupiah)	63
9.	Perkembangan nilai realisasi investasi PMA menurut sektor (juta USD)	63
10.	Pagu anggaran per unit eselon I Kementerian Pertanian tahun 2005-2012 (dalam miliar rupiah)	67
11.	Perbandingan elemen penganggaran sebelum dan setelah pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan Negara di Indonesia	71
12.	Pencapaian reformasi pengelolaan keuangan Negara pada tahap pengenalan (2005-2009) dan rencana tindak pada tahap pematangan (2010-2014)	75
13.	Analisis gap pelaksanaan penganggaran terpadu di Kementerian Pertanian	78
14.	Analisis gap implementasi penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Pertanian	84
15.	Peraturan terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah	91
16.	Analisis gap implementasi konsep kerangka pengeluaran jangka menengah di Kementerian Pertanian	95
17.	Penduga parameter model pengaruh realisasi belanja pada program kerja Kemtan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian	104
18.	Hasil kerja Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2005-2012	108
19.	Perbandingan jumlah fungsional peneliti dengan total jumlah pegawai pada Badan Litbang Pertanian tahun 2005-2012	109
20.	Alokasi subsidi pertanian, subsidi non energi dan total alokasi belanja subsidi tahun 2005-2013	119

Hak cipta ditahapangi Undang-Undang

Hak cipta ditahapangi Undang-Undang

Hak cipta ditahapangi Undang-Undang



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR GAMBAR

1. PDB riil berbagai sektor di Indonesia atas dasar harga konstan tahun 2000 dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia	2
2. Jumlah tenaga kerja Indonesia per sektor tahun 2004-2012	3
3. Alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian berdasarkan jenis belanja periode tahun 2005-2013	5
4. Produktivitas tenaga kerja per sektor di Indonesia tahun 2004-2012	6
5. Proses kebijakan publik	12
6. Sekuensi implementasi kebijakan publik	13
7. Kenaikan Belanja Pemerintah dalam Model IS LM	19
8. Penurunan Pajak dalam Model IS-LM	20
9. Kerangka pikir analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan	21
10. Alur proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia	23
11. Kerangka konseptual penelitian	39
12. Metodologi <i>gap analysis</i>	45
13. Empat target utama Kementerian Pertanian tahun 2010-2014	55
14. Struktur organisasi Kementerian Pertanian	56
15. Target dan capaian pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia tahun 2005-2012	58
16. Tren dan pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia periode tahun 2005-2012	59
17. Kontribusi rata-rata per sub sektor terhadap PDB sektor pertanian (di luar sub sektor perikanan dan kehutanan) tahun 2005-2012	59
18. Kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia	61
19. Nilai tukar petani Indonesia periode tahun 2005-2012	61
20. Pagu dan realisasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2005-2013	65
21. Dana alokasi khusus bidang pertanian dan bidang irigasi	68
22. Pagu anggaran Kementerian Pertanian berdasarkan kewenangan	69
23. Siklus penyusunan APBN	74
24. Tahapan pelaksanaan reformasi penganggaran	75
25. Kerangka ideal penganggaran terpadu	77
26. Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran	83
27. Nilai-nilai Tabel <i>Durbin-Watson</i> untuk pengujian autokorelasi	105
28. Komposisi realisasi belanja per jenis belanja Badan Litbang Kementerian Pertanian	107
29. Alokasi dan realisasi anggaran Badan Litbang Kemtan tahun 2005-2012	107
30. Alokasi dan realisasi anggaran BP2SDM Pertanian tahun 2005-2012	110
31. Alokasi dan realisasi anggaran Ditjen PSP tahun 2005-2012	113
32. Komposisi realisasi belanja program pengadaan prasarana dan sarana pertanian per jenis belanja	115
33. Realisasi belanja program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian	116
34. Perbandingan realisasi anggaran Kemtan dengan alokasi subsidi pupuk dan benih	119

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

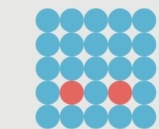


DAFTAR GAMBAR (lanjutan)

4.	Kendala dan permasalahan penerapan penganggaran terpadu, PBK dan KPJM dalam setiap tahapan penganggaran di Kemtan	122
5.	Rencana tindak lanjut perbaikan penerapan penganggaran terpadu, PBK dan KPJM pada setiap tahapan penganggaran di Kemtan	123

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Daftar pertanyaan wawancara	134
2.	Data triwulan PDB nominal sektor pertanian dan realisasi anggaran per program tahun 2005-2012	141
3.	Data triwulan PDB riil sektor pertanian dan realisasi anggaran riil per program (setelah dibagi dengan PDB deflator) tahun 2005-2012	142
4.	Data triwulan pertumbuhan PDB riil sektor pertanian dan persentase realisasi anggaran riil per program terhadap PDB riil sektor pertanian tahun 2005-2012	143
5.	Hasil analisis regresi linier berganda	144
6.	Hasil uji normalitas	144
7.	Hasil uji heteroskedastisitas	145
8.	Hasil uji korelasi antara realisasi anggaran Badan Litbang pertanian (RA) dengan jumlah varietas hasil pertanian yang dihasilkan (JV), jumlah teknologi yang diusulkan mendapatkan hak paten (JT) dan jumlah teknologi yang mendapatkan hak paten (JTP)	145
9.	Hasil uji korelasi antara jumlah fungsional peneliti di Badan Litbang pertanian (JFP) dengan jumlah varietas hasil pertanian yang dihasilkan (JV), jumlah teknologi yang diusulkan mendapatkan hak paten (JT) dan jumlah teknologi yang mendapatkan hak paten (JTP)	146



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.